ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2020 (STUDI PADA DESA WAMBOULE KABUPATEN BUTON UTARA)

¹Suriyani BB, ²Liwaul, ³Gita Listafila

^{1,2,3}Jurusan Administrasi Publik FISIP, Universitas Halu Oleo

Email: suriyanibb@gmail.com, liw4ul@gmail.com, gitalista01@gmail.com

Kendari, Indonesia

Abstract

This study aims to describe the management of village funds in the village of Wamboule, North Buton Regency and to describe the implementation of the development of the village of Wamboule, North Buton Regency. The data analysis method used in this research is descriptive qualitative. This study uses data sourced from primary and secondary data. The results of this study state that the management of village funds in Wamboule village, North Buton Regency can be said to be good based on three indicators, namely planning, implementation and accountability in accordance with the mandate of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 8 of 2016 concerning the second Amendment to Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 60 of 2014 concerning Village Funds sourced from the State Budget and Expenditure Revenue. The implementation of the development of the Wamboule village, North Buton Regency in 2020 is going well based on the aspect of development and the use of the budget in accordance with the plan. In the implementation of development, the Wamboule village government always involves the community in both physical and non-physical development.

Keywords: Village Fund; Village Development

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan dana desa di desa Wamboule Kabupaten Buton Utara dan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembangunan desa Wamboule Kabupaten Buton Utara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan dana desa di desa Wamboule Kabupaten Buton Utara sudah bisa dikatakan baik berdasarkan tiga indikator yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. Adapun pelaksanaan pembangunan desa Wamboule Kabupaten Buton Utara tahun 2020 berjalan dengan baik berdasarkan segi pembangunan maupun penggunaan anggarannya sesuai dengan perencanaan. Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah desa Wamboule selalu melibatkan masyarakat baik di pembangunan fisik maupun non fisik.

Kata Kunci: Dana Desa; Pembangunan Desa

PENDAHULUAN

Pedesaan merupakan bagian dari Negara Republik Indonesia. Membangun pedesaan atau disebut desa, juga berarti membangun sebagian besar penduduk yang berada di Indonesia, hal tersebut akan lebih mudah dimengerti karena lebih dari delapan puluh persen penduduk Indonesia tersebar di desa-desa seluruh Indonesia. Dengan disahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Pembangunan desa dilakukan sebagai upaya memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial masyarakat desa dengan melakukan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan ekonomi masyarakat. Untuk menangani masalah ketimpangan pembangunan pemerintah dapat melakukan strategi yang berawal dari pembangunan desa.

Salah satu indikator pembangunan desa dapat dilakukan dengan pemanfaatan dana desa. Dana desa berfungsi untuk pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat desa serta pembangunan ekonomi masyarakat desa. Dana desa diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proposional. Alokasi dana desa diambil dari 10% dari dana APBD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, maka pembangunan desa dapat dilakukan dengan dana desa.

Desa Wamboule merupakan salah satu desa yang memiliki sumber pendapatan dari Dana Desa (DD) Anggaran Dana Desa dari tahun ke tahun berbeda dan telah banyak melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan jalan usaha tani, pembangunan sarana dan prasana olahraga, pemabngunan masjid, pengadaan bantuan kepada warga desa, pembangunan kantor desa, balai pertemuan.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, Penelitian ini dilakukan pada Desa Wamboule Kabupaten Buton Utara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan penelitian yaitu Kepala Desa, BPD, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Pemuda Desa Wamboule

Kabupaten Buton Utara. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung informan peneliti. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dan berhubungan dengan penelitian seperti dokumen, buku, Jurnal, arsip dan skripsi. Dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Dana Desa Wamboule Kabupaten Buton Utara

Pengelolaan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa. Pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa serta masyarakat menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa.

Pengelolaan dana desa adalah bagian dari tata pemerintahan desa yang baik (good governance) dalam pengelolaan keuangan desa, dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Dana desa yang cukup besar nilainya diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa, pembangunan sarana dan prasarana desa dan benar-benar dapat dilaporkan serta dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif. (Nursati dan H. Abdul Kadir, 2020).

Anggaran Dana Desa Wamboule pada tahun 2020 mencapai Rp. 913.186.000. Penggunaan dana desa Wamboule tahun anggaran 2020 di prioritaskan untuk bidang pembangunan desa dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak. Dari total anggaran dana desa tahun 2020 sebesar Rp. 913.186.000, dibagi dalam dua bidang, yaitu bidang pembangunan desa sebesar Rp. 612.817.400. Sedangkan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak sebesar Rp. 209.050.000 serta penyertaan modal desa sebesar Rp. 91.318.600. Dalam tahap pengelolaan dana desa Wamboule tahun anggaran 2020 ada tiga indikator yang dilakukan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Dalam tahap perencanaan pengelolaan dana desa Wamboule, proses perencanaannya dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dimana RPJMDesa memuat rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Kemudian dilanjutkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Daftar usulan RKPDesa ada 21 jenis kegiatan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 dengan menggunakan anggaran dana desa di bidang pembangunan desa. Dari daftar usulan RKPDesa tersebut, hanya 10 jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, hal ini dikarenakan anggaran dana desa yang dikelola terbatas sehingga hanya kegiatan yang mendesak yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Dari 10 jenis kegiatan tersebut dibagi menjadi lima sub bidang yaitu sub bidang pendidikan, sub bidang kesehatan, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup, sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Setelah disimpulkan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan kemudian dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Data ringkasan APBDesa Wamboule tahun 2020, dimana setiap program kerja untuk pembangunan desa dibagi kesetiap sub bidang yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, bidang pembangunan desa memiliki anggaran sebesar Rp. 625.551.355. Selain bidang pembangunan desa penggunaan anggaran Dana Desa (DD) juga ada bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak yang menggunakan anggaran sebesar Rp.196.356.065 dan pembiayaan Badan Usaha Milik Desa sebesar Rp. 91.318.600.

Proses perencanaan pengelolaan dana desa Wamboule sudah baik. Hal ini sesuai dengan proses observasi pada saat di lokasi penelitian, dimana perencanaan pengelolaan dana desa sesuai dengan hasil wawancara baik dari pemerintah desa maupun masyarakat desa Wamboule yang dibuktikan dengan arsip desa baik dalam bentuk hasil dokumentasi maupun kearsipan persuratan kantor desa Wamboule.

2. Pelaksanaan

Sri Mulyani Indrawati (2017), dalam pelaksanaan pembangunan desa telah membagi per sub bidang pembangunan yang diprioritaskan tiap tahunnya yaitu sub bidang pendidikan, sub bidang kesehatan, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub bidang kawasan pemukiman, sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup, sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatik, sub bidang energi dan sumberdaya mineral dan sub bidang pariwisata.

Pelaksanaan pengelolaan dana desa Wamboule yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2020 dibagi menjadi tiga tahap penyaluran anggaran pendapatan dan belanja desa. Anggaran dana desa Wamboule disalurkan pada tahap II dan tahap III, dimana pada tahap I hanya anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang disalurkan, sehingga hasil pelaksanaan pengelolaan dana desa dimulai dari tahap II dan tahap III.

Pelaksanaan pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa Wamboule berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku hal ini terlihat dari proses observasi saya pada saat penelitian dimana dimulai dari proses pendanaan, pelaksanaan kegiatan dan antusias

dari warga semua berjalan dengan baik. Kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah sangat baik karena sudah sesuai dengan program kerja yang diprioritaskan oleh pemerintah pusat. Selain itu juga untuk penanganan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak sudah tepat sasaran.

3. Pertanggungjawaban

Tahap selanjutnya adalah pertanggungjawaban. Pada tahap ini pemerintah desa akan melaporkan pertanggungjawaban kegiatan yang dilakukan selama satu tahun baik kegiatan yang terealisasi maupun tidak semuanya akan dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban desa. Laporan pertanggungjawaban ini merupakan hasil pengelolaan dana desa selama tahun 2020 yang digunakan dalam proses pembangunan desa yang dilakukan secara transparansi kepada masyarakat. Laporan pertanggungjawaban ini akan di bacakan oleh Kepala Desa Wamboule dihadapan masyarakat desa Wamboule dalam rapat terbuka untuk pertanggungjawaban. Sri Mulyani Indrawati (2017) menjelaskan bahwa tahap pertanggungjawaban merupakan tahap pelaporan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Penyajian data laporan pertanggungjawaban Desa Wamboule tahun 2020 dengan total anggaran Dana Desa yang dikelola sebesar Rp. 913.186.000. dengan 3 bidang kegiatan yang menjadi acuan pengelolaan Dana Desa yaitu 1) Bidang Pembangunan Desa dengan total anggaran sebesar Rp. 612.817.400., 2) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak sebesar Rp.209.050.000., serta 3) Pembiayaan Badan Usaha Milik Desa sebesar Rp. 91.318.600. Berdasarkan rincian tabel diatas penggunaan Dana Desa Wamboule tahun 2020 memiliki sisa anggaran sebesar Rp. 2.550.000. berdasarkan aturan yang ada sisa anggaran penggunaan Dana Desa akan dikembalikan ke daerah.

Laporan pertanggungjawaban Pengelolaan dana desa Wamboule sudah berjalan dengan baik hal ini sesuai juga dengan proses observasi saya mulai dari dokumen laporan, dokumentasi kegiatan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa Wamboule tahun 2020.

B. Pelaksanaan Pembangunan Desa Wamboule Kabupaten Buton Utara

1. Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik Desa Wamboule meliputi sarana dan juga prasarana pemerintahan. Pembangunan fisik di Desa Wamboule tahun anggaran 2020 dengan 8 (delapan) jenis kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.514.091.4000. dari delapan jenis kegiatan pembangunan fisik diatas semuanya terealisasi dengan baik. Ada satu jenis kegiatan yang memiliki sisa anggaran yaitu kegiatan pemeliharaan jalan usaha tani dengan sisa anggaran sebesar Rp. 50.000, sisa anggaran tersebut akan dikembalikan ke daerah.

Pembangunan fisik Desa Wamboule juga melibatkan banyak masyarakat terutama kegiatan pemeliharaan jalan usaha tani dan pembangunan jalan usaha tani yang mengharuskan HOK (Hari Orang Kerja) 30% dari jumlah anggaran kegiatan. Jadi hal ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik desa selalu melibatkan masyarakat Desa Wamboule karena dalam pembangunan desa yang bersumber dari anggaran Dana Desa harus transparansi terhadap masyarakat.

2. Pembangunan Non Fisik

Pembangunan non fisik Desa Wamboule lebih mengarah kepada pemberdayaan masyarakat, seperti peningkatan perekonomian masyarakat desa, peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan kesehatan masyarakat Desa Wamboule. Pembangunan non fisik desa Wamboule tahun 2020 yang terdiri dari dua jenis kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 98.726.000. kedua jenis kegiatan diatas terealisasi dengan baik, untuk kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPK memiliki sisa anggaran sebesar Rp.2.500.000. sisa anggaran tersebut akan dikembalikan ke daerah.

pembangunan desa wamboule sudah berjalan dengan baik dan lancar hal ini dikarenakan adanya segi anggaran yang sudah jelas, masyarakat yang turut bekerja sama dalam pembangunan, pembangunan desa wamboule juga sudah meliputi pembangunan fisik dan non fisik setiap tahunnya.

Pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Wamboule tahun 2020 sudah sangat baik hal ini terlihat dari hasil observasi dan wawancara dimana proses pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dilakukan secara transparansi ke masyarakat, tahapan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku serta pembangunan desa mengutamakan yg lebih prioritas untuk kepentingan bersama antara masyarakat dan pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan pendapat Sri Mulyani Indrawati (2017) yang menyatakan bahwa dalam penetapan prioritas pembangunan desa, perlu di perhatikan prinsip prinsip penggunaan dana desa yaitu keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumberdaya desa dan tipologi desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah yang dilakukan oleh peneliti mengenai Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2020 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa Wamboule Kabupaten Buton Utara bisa dikatakan baik. Karena dari tiga indikator pengelolaan dana desa yaitu: perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. Selain sudah sesuai dengan PP No 8 Tahun 2016 dalam pengelolaan Dana Desa Pemerintah Desa juga selalu melibatkan masyarakat Desa Wamboule mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Wamboule dalam penggunaan Dana Desa selalu Transparansi dengan masyarakat.

2. Pelaksanaan pembangunan desa wamboule kabupaten buton utara tahun 2020 berjalan dengan baik, mulai dari segi pembangunannya maupun penggunaan anggarannya sudah sesuai dengan tahap perencanaannya. Pelaksanaan pembangunan desa Wamboule selalu melibatkan masyarakat baik di pembangunan fisik maupun non fisik. Pada pembangunan fisik masyarakat desa Wamboule melibatkan diri dalam mensukseskan pembangunan dengan cara menjadi pekerja dalam pembangunan seperti pembukaan dan pemeliharaan jalan usaha tani sedangkan pada pembangunan non fisik masyarakat desa Wamboule melibatkan diri dalam mensukseskan pembangunan dengan cara ikut berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan posyandu setiap bulannya.

REFERENSI

Sumber Buku :

Adrimas. 2012. Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Adalas University.

Ara Lili, Marselina. (2018). Pengalolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagen Karya, Kecamatan Lumar. Artikel Ilmiah Universitas Tanjung Pura.

Dwi Mukti Wibowo. 2019. Dana Desa sebagai Pelumas roda pembangunan ekonomi desa. Jakarta.

Hanif Nurcholis. 2011. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta : Penerbit AERLANGGA.

Indrawati, Sri Mulyani. 2017. "Buku Saku Dana Desa" Jakarta : Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kessa, Wahyudin. 2015. "Perencanaan Pembangunan Desa". Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Kuncoro, Mudrajad. 2010. Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan, UPP STIM YKPN Yogyakarta.

Miles, Matthem B, A. Micheal Huberman, and J Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3 AUS : Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohidin Rohidi, lu-Press.

Nursati, Nursati, and H. Abdul Kadir. "AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM AKSELERASI PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN LADONGI KABUPATEN KOLAKA TIMUR." *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik* 11.1: 124-135.

Muhi, Ali Hanapiah. 2011. Perencanaan Pembangunan Desa. Institute Pemerintahan Dalam

Negeri (IPDN). Jatinegoro, Jawa Barat, Alqaprint.

Nunuk Riyanti. Analisis Pengelolaan Dana Desa. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta, 2016.

Nurman. 2015. Strategi Pembangunan Daerah. Pekanbaru : PT Rajagrafindo Persada.

Siagian, Sondang. 2014. Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strategi. Jakarta Bumi Aksara.

Sugiono. 2012. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D (Cetakan ke 15) Alfabeta : Bandung.

Winarno, Budi. 2013. Etika Pembangunan. Jakarta. CPAS (Center For Academic Publishing Service).

Sumber Jurnal :

Abdullah, dkk. Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 15, No. 01. Juni, 2017.

Aisyah, Nadya Ayu. 2015. Analisis pengelolaan dan penyajian laporan keyangan Dana Desa atas Penerapan UU. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Tunjungtirta Kecamatan Singosari Kabupaten Malang pada tahun 2015. SKRIPSI. Universitas Malang. Malang.

Deki Aji Suseni dan St Sunarto. 2016. Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Jurnal Stie Semarang. Vol. 8, No.2.

I Gusti Putu Geria Warisita, dkk. 2017. Pengaruh Sistem Pengelolaan Dana DEsa terhadap Laporan Keuangan Desa Tua Marga Tabanan. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika. Vol. 7 No.3.

Surati, dkk. 2018. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. Publik Jurnal Ilmu Administrasi. Vol. 6, No.2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Tentang Keuangan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 79 Tentang Pembangunan Desa.